

LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)
CAMAT ILE BURA
TAHUN 2021



KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ILE BURA
LEWOTOBI

PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Camat Ile Bura Tahun 2021, dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Bupati merupakan salah satu kewajiban pemerintah kecamatan dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

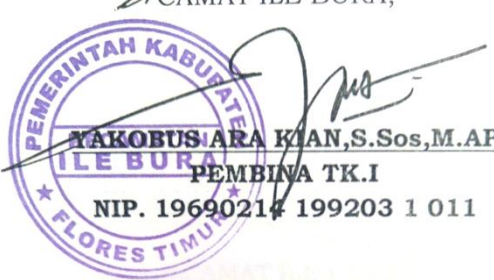
Penyampaian LKPJ kepada Pemerintah secara substansial merupakan sebuah *progress report* yang menggambarkan kinerja pemerintah kecamatan secara utuh, selama satu tahun anggaran. LKPJ ini juga menggambarkan akuntabilitas capaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian gambaran kinerja di dalam LKPJ ini merupakan implementasi dari penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Sejalan dengan itu, LKPJ secara substantif merupakan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang dicapai selama satu tahun anggaran dengan berbagai keberhasilan dan tentunya masih terdapat kekurangan yang harus dibenahi dan ditingkatkan pada tahun mendatang. Atas segala keterbatasan, kekurangan dan kelemahan yang menyebabkan belum optimalnya beberapa hal dalam proses pencapaian target kinerja pada Tahun 2021, akan dijadikan bahan evaluasi dalam penyempurnaan kinerja Pemerintah kecamatan di tahun mendatang. Segala saran, kritikan yang bersifat koreksi konstruktif sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah ke depan.

Akhirnya segala usul/saran untuk penyempurnaan dokumen ini serta bagi peningkatan kinerja Kantor Camat Ile Bura di masa mendatang sangat kami harapkan, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita.

Lewotobi, Januari 2022.

CAMAT ILE BURA,



YAKOBUS ARA KIAN, S.Sos, M.AP
PEMBINA TK.I
NIP. 19690214 199203 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	Ii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Dasar Hukum.....	2
1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	2
1.3. Data Umum Wilayah.....	3
1. Data Geografis Wilayah.....	3
2. Jumlah Penduduk.....	4
3. Pertumbuhan Penduduk.....	5
4. Jumlah PNS.....	5
5. Realisasi Pendapatan.....	7
6. Realisasi Belanja.....	8
7. Realisasi Pembiayaan.....	13
 BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	 13
 BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....	 13
3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	13
 BAB IV TUGAS UMUM PEMERINTAH.....	 18
4.1. Forum Koordinasi.....	18
4.2. Fasilitas Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2022.....	18
4.3. Fasilitas Dokumen Pendapatan dan Belanja Desa TA.2021.....	19
4.4. Fasilitas Perecepatan Pengelolaan Keuangan Desa TA.2021.....	20
 BAB V PENUTUP.....	 22

BAB I

PENDAHULUAN

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD, LKPJ, dan Informasi LPPD. Bagi Pemerintah LPPD dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah.

Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah.

Sebagai tindak lanjut dari surat Bupati Flores Timur nomor: Pem.Um.130/77/Adm.Pem/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Penegasan Permintaan Data LKPJ dan LPPD Tahun 2021, maka Camat wajib memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di wilayah kecamatan sebagai konsekuensi kewenangan yang diberikan dalam kerangka pembinaan dan pengawasan tata kelola pemerintahan daerah di wilayah. Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pelimpahan tugas dimaksud dan juga sebagai bahan referensi dalam penyusunan laporan bupati kepada gubernur dan nantinya akan diukur sejauh mana kinerja pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam 1 tahun berjalan.

1.1. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kecamatan Ile Bura tentunya tidak terlepas dari berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Demon Pagong, Kecamatan Lewolema, Kecamatan Ile Bura, Kecamatan Adonara Tengah dan Kecamatan Adonara

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur adalah **Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata.**

Visi tersebut di atas dapat dijelaskan :

1. **Flores Timur Sejahtera** adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Flores Timur agar dapat hidup layak dan harmonis serta mampu mengembangkan diri dan lingkungannya.
2. **Desa Membangun Kota Menata** adalah Desa/kota yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya pada aspek sosial, ekonomi dan ekologi sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk pemukiman dan pelayanan kemasyarakatan.

Desa Membangun Kota Menata merupakan satu kesatuan gerak seluruh masyarakat Flores Timur, baik yang berada di desa maupun di kota untuk mewujudkan kemandirian dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi local menuju Flores Timur sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 telah ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Flores Timur yang merupakan rumusan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu :

1. **Selamatkan Orang Muda Flores Timur** dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu menciptakan suatu kondisi kehidupan yang memungkinkan orang muda Flores Timur dapat mengaktualisasi diri pada aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupannya.
2. **Selamatkan Infrastruktur Flores Timur** dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu mewujudkan infrastruktur Flores Timur yang terjamin kualitas dan kuantitasnya dan mampu meningkatkan kinerja transportasi dan memperlancar aksesibilitas wilayah.
3. **Selamatkan Tanaman Rakyat** dimaksudkan agar tanaman rakyat yang merupakan komoditi unggulan dan potensial ditingkatkan produktivitas dan nilai ekonominya.
4. **Selamatkan Laut Flores Timur** dimaksudkan agar wilayah laut sebagai tempat kehidupan petani nelayan Flores Timur terpelihara ekosistem dan potensinya agar mampu member jaminan kehidupan layak bagi nelayan dan masyarakat pesisir Flores Timur.
5. **Reformasi Birokrasi** dimaksudkan agar terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip Good Governanance dan Clean Government

1.3. Data Umum Wilayah

1. Data Geografis Wilayah

Kecamatan Ile Bura merupakan salah satu kecamatan dalam wilayah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk pada tahun 2007, dengan topografi bergunung dan berbukit dengan kemiringan yang lebih dominan < 500 m DPL, dengan musim hujan \pm 3 bulan dan musim kemarau 9 bulan membawa kendala tersendiri. Selain itu, seiring dengan perubahan iklim global, pergantian musim menjadi tidak menentu dan anomali cuaca yang sulit diprediksi, membawa implikasi tersendiri terhadap berbagai kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Ile Bura ini.

Luas wilayah Kecamatan Ile Bura adalah : 48,53 Km² dan memiliki batas wilayah sebagai berikut :

U t a r a	: Kecamatan Titehena – Kabupaten Flores Timur
S e l a t a n	: Selat Lewotobi
T i m u r	: Kecamatan Titehena – Kabupaten Flores Timur
B a r a t	: Kecamatan Wulanggitang- Kabupaten Flores Timur

Luas wilayah per desa dan tinggi rata-rata dari permukaan laut seperti tampak pada tabel berikut :

Tabel				
Luas Wilayah Per Desa dan Tinggi Rata-rata dari Permukaan Laut				
No.	Nama Desa	Luas Desa (Km ²)	Tinggi Rata-rata DPL (m)	Persentase Terhadap Kecamatan
1	2	3	4	5
1.	Nobo	2.75	100	5.67
2.	Nurabelen	8.45	100	17.41
3.	Riang Rita	3.85	100	7.93
4.	Lewotobi	9.15	100	18.85
5.	Lewoawang	10.25	100	21.12
6.	Riangbaring	8.26	300	17.02
7.	Dulipali	5.82	1200	11.99
Jumlah		48.53		100.00

Sumber : Profil Kecamatan Ile Bura dalam Angka

2. Jumlah Penduduk

Sebaran penduduk Kecamatan Ile Bura sampai 31 Desember 2021, tercatat mencapai 7.504 jiwa, dengan rincian sebagai berikut : Laki-laki sebanyak 3.753 jiwa atau 50,01% dan Perempuan sebanyak 3.751 jiwa atau 49,98%. Sedangkan desa dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada pada Desa Nobo sebanyak 1.642 jiwa atau 21,88%, disusul Desa Lewotobi sebanyak 1.382 jiwa atau 18,41% dan Desa Lewoawang sebanyak 1.320 jiwa atau 17,59%. Sedangkan sebaran penduduk terendah adalah Desa Dulipali sebanyak 770 jiwa atau 10,26%, disusul Desa Riangrita sebanyak 689 jiwa atau 9,18%

Tabel					
Jumlah Penduduk Kecamatan Ile Bura per Desa Tahun 2021					
No.	Nama Desa	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
			Laki-laki	Perempuan	Total
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
1.	Nobo	365	834	808	1.642
2.	Nurabelen	208	449	408	857
3.	Riang Rita	158	339	350	689
4.	Lewotobi	350	690	692	1.382
5.	Lewoawang	322	652	668	1.320
6.	Riangbaring	208	425	419	844
7.	Dulipali	175	364	406	770
Jumlah		1.786	3.753	3.751	7.504

Sumber : Seksi Pemerintahan Tahun 2021

3. Pertumbuhan Penduduk

Dalam demografi dan ekologi, Nilai Pertumbuhan Penduduk (NPP) adalah nilai kecil di mana jumlah individu dalam sebuah populasi meningkat. NPP hanya merujuk pada perubahan populasi pada periode waktu unit, sering diartikan sebagai persentase jumlah individu dalam populasi ketika dimulainya periode. Nilai Pertumbuhan Penduduk didapat dari Populasi Akhir Periode dikurangi Populasi Awal Periode dibagi Populasi Awal Periode.

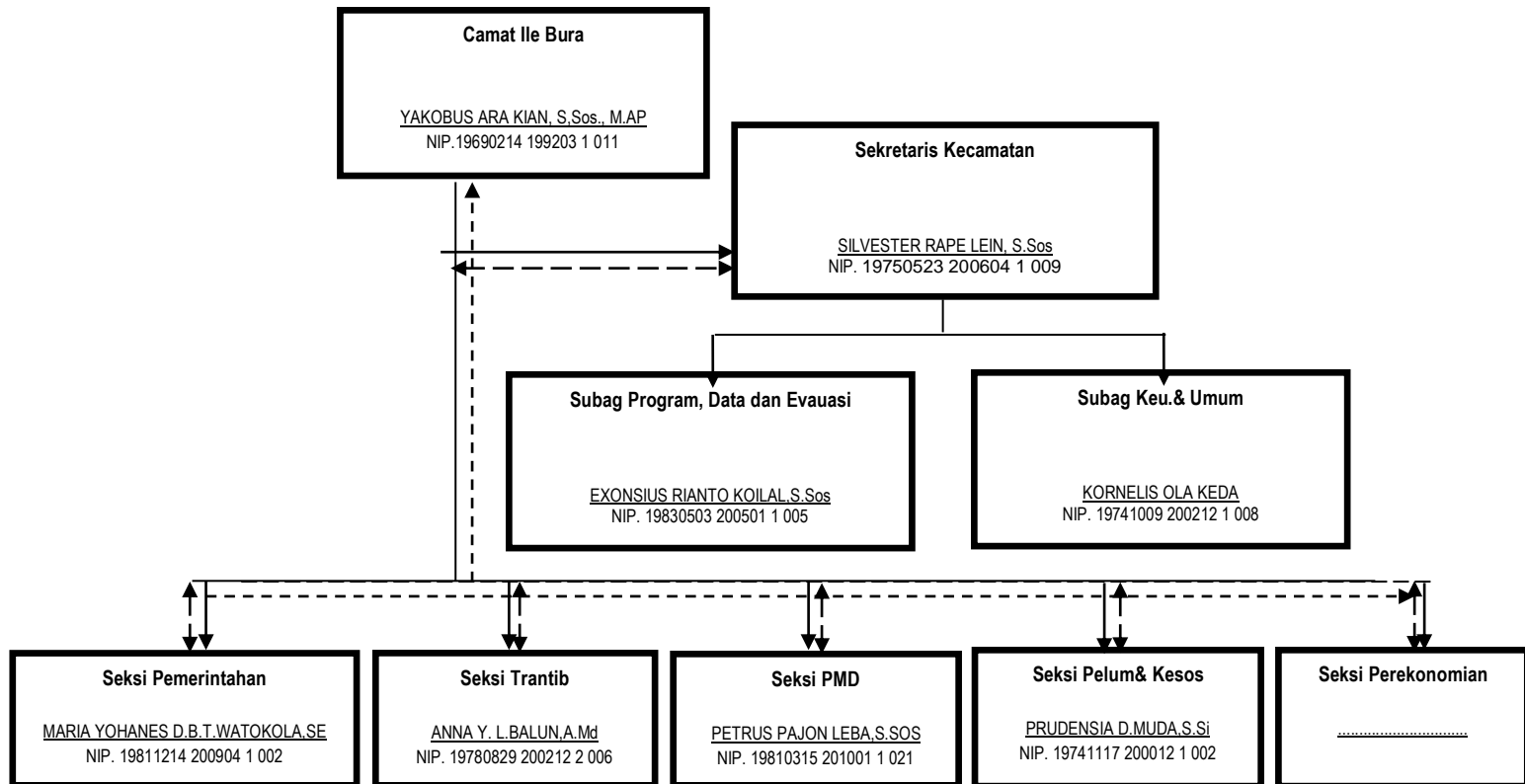
Berdasarkan hasil rekapitulasi penduduk Kecamatan Ile Bura tahun 2021, Nilai Pertumbuhan dan Rasio Penduduk di Kecamatan Ile Bura dapat dilihat pada table dibawah.

Tabel				
Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Ile Bura Tahun 2021				
No.	Nama Desa	Jumlah Penduduk		Nilai Pertumbuhan
		Awal tahun	Akhir tahun	Penduduk
1	2	3	4	5
1.	Nobo	1.630	1.639	0,01
2.	Nurabelen	834	857	0,03
3.	Riang Rita	701	689	0,02
4.	Lewotobi	1.373	1.382	0,01
5.	Lewoawang	1.247	1.321	0,06
6.	Riangbaring	853	843	0,01
7.	Dulipali	762	771	0,01
Jumlah		7.400	7.502	0,14

Sumber : Seksi Pemerintahan Tahun 2021

4. Jumlah PNS

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 98 Tahun 2016. Tata kelola pemerintahan Kecamatan Ile Bura dipimpin oleh seorang Camat dan dibantu seorang Sekretaris, 4 orang Kepala Seksi, 2 orang kepala sub bagian dan 4 staf pelaksana. Di samping itu pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Camat Ile Bura dibantu oleh 5 orang tenaga kontrak. Adapun Struktur Organisasi Kantor Camat Ile Bura sesuai Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 98 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :



Sumber Daya Aparatur dalam Jabatan Struktural SKPD Kecamatan Ile Bura dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

Tabel
Jumlah PNS Kantor Camat Ile Bura berdasarkan Jabatan Tahun 2021

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH PEGAWAI
1.	Camat	III.a	1 orang
2.	Sekretaris Camat	III.b	1 orang
3.	Kepala Seksi	IV.a	4 orang
4.	Kasubag	IV.b	2 orang
JUMLAH			8 orang

Sumber :Bagian Kepeg. Kantor Camat Ile Bura Tahun 2021.

Tabel
Keadaan PNS Menurut Pangkat Golongan / Ruang

NO	PANGKAT	GOLONGAN/ RUANG	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pembina Tingkat I	IV/b	1 orang
2.	Pembina	IV/a	1 orang
3.	Penata Tingkat I	III/d	3 orang
4.	Penata	III/c	1 orang
5.	Penata Muda Tingkat I	III/b	1 orang

6.	Penata Muda	III/a	1 orang
7.	Pengatur Tingkat I	II/d	2 orang
8.	Pengatur	II/c	2 orang
9.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-
10.	Pengatur Muda	II/a	-
11.	Juru Tingkat I	I/d	-
12.	Juru Muda Tingkat I	I/b	-
13.	Juru Muda	I/a	-
JUMLAH			12 orang

Sumber : Bagian Kepeg. Kantor Camat Ile Bura Tahun 2021.

Tabel
Keadaan PNS Menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pasca Sarjana (S-2)	1 orang
2.	Sarjana (S-1)	5 orang
3.	Diploma III/Akademi/Ahli Madya	1 orang
4.	Diploma I/Diploma II	0 orang
5.	SLTA	5 orang
6.	SLTP	0 orang
7.	SD	0 orang
JUMLAH		12 orang

Sumber : Bagian Kepeg. Kantor Camat Ile Bura Tahun 2021.

Tabel
Keadaan PNS Menurut Diklat Penjenjangan

NO	DIKLAT PENJENJANGAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	PIM II / SPAMEN	0 orang
2.	PIM III / SPAMA	1 orang
3.	PIM IV / ADUM / ADUMLA	2 orang
JUMLAH		3 orang

Sumber : Bagian Kepeg. Kantor Camat Ile Bura Tahun 2021.

Keadaan Tenaga Honorer Kecamatan Tahun 2021 berjumlah : 5 (*Lima*) orang.

5. Realisasi Pendapatan

NIHIL

6. Realisasi Belanja

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten**

- a. **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Target	:	Rp 23.777.000				
Realisasi	:	Rp 23.777.000				
Prosentase	:	100,00%				
Output	:	Tersedianya dana untuk penyusunan dokumen kinerja				
Outcome	:	Tercapainya penyusunan laporan dokumen Kinerja				
		Kecamatan				

- b. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Target	:	Rp 954.959.028				
Realisasi	:	Rp 812.658.697				
Prosentase	:	85,10%				
Output	:	Tersedianya gaji dan tunjangan untuk ASN				
Outcome	:	Terpenuhinya kebutuhan pokok pegawai				

- 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

Target	:	Rp 24.840.000				
Realisasi	:	Rp 24.840.000				
Prosentase	:	100,00%				
Output	:	Tersedianya honorarium bagi Satuan Perangkat Pemegang Kas				
Outcome	:	Terlaksananya pengelolaan anggaran untuk pembiayaan				
		program dan kegiatan.				

- c. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Target	:	Rp 1.999.392				
Realisasi	:	Rp 1.999.392				
Prosentase	:	100,00%				
Output	:	Tersedianya instalasi listrik gedung kantor yang baik.				
Outcome	:	Terpenuhinya kebutuhan listrik kantor yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.				

2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

<i>Target</i>	: Rp 11.400.000				
<i>Realisasi</i>	: Rp 11.373.363				
<i>Prosentase</i>	: 99,77%				
<i>Output</i>	: Tersedianya alat tulis kantor yang memadai.				
<i>Outcome</i>	: Terselenggaranya urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang optimal.				

3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

<i>Target</i>	: Rp 14.949.600				
<i>Realisasi</i>	: Rp 14.949.600				
<i>Prosentase</i>	: 100,00%				
<i>Output</i>	: Tersedianya dana untuk penggandaan dan penjiilidan.				
<i>Outcome</i>	: Tersedianya dokumen administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.				

4. Fasilitas Kunjungan Tamu.

<i>Target</i>	: Rp 15.000.000				
<i>Realisasi</i>	: Rp 15.000.000				
<i>Prosentase</i>	: 100,00%				
<i>Output</i>	: Tersedianya anggaran makanan dan minuman rapat dan tamu dinas.				
<i>Outcome</i>	: Terciptanya sinergisitas sistem koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.				

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

<i>Target</i>	: Rp 24.670.000				
<i>Realisasi</i>	: Rp 24.670.000				
<i>Prosentase</i>	: 100,00%				
<i>Output</i>	: Tersedianya dana operasional pendukung.				
<i>Outcome</i>	: Terlaksananya koordinasi dan konsultasi vertikal dan horisontal dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.				

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

<i>Target</i>	:	Rp 720.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 720.000				
<i>Prosentase</i>	:	100,00%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya meterai.				
<i>Outcome</i>	:	Terlaksananya urusan administrasi surat menyurat, optimalisasi koordinasi vertikal demi sinergisitas pelaksanaan program dan kegiatan.				

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

<i>Target</i>	:	Rp 9.495.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 9.495.000				
<i>Prosentase</i>	:	100,00%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya pulsa, air bersih dan listrik/penerangan.				
<i>Outcome</i>	:	Terlaksananya koordinasi pemerintahan, terpenuhinya kebutuhan akan air bersih dan penerangan yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.				

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

<i>Target</i>	:	Rp 57.500.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 56.750.000				
<i>Prosentase</i>	:	98,70%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya dana untuk membiayai tenaga pendukung dan teknis perkantoran.				
<i>Outcome</i>	:	Tersedianya tenaga pendukung dan teknis kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.				

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

<i>Target</i>	:	Rp 6.998.245				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 6.998.245				
<i>Prosentase</i>	:	100,00%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya biaya servis kendaraan dan BBM				
<i>Outcome</i>	:	Terpenuhinya kebutuhan operasional kendaraan dinas kantor dan operasional perkantoran.				

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

<i>Target</i>	:	Rp 20.528.500				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 20.528.500				
<i>Prosentase</i>	:	100,00%				
<i>Output</i>	:	Terpeliharanya bangunan gedung kantor.				
<i>Outcome</i>	:	Terciptanya situasi kerja yang kondusif bagi aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.				

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

<i>Target</i>	:	Rp 5.800.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 5.800.000				
<i>Prosentase</i>	:	100,00%				
<i>Output</i>	:	Terpeliharanya bangunan gedung kantor.				
<i>Outcome</i>	:	Terciptanya situasi kerja yang kondusif bagi aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.				

- **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

- a. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**

- 1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

<i>Target</i>	:	Rp 58.875.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 58.865.000				
<i>Prosentase</i>	:	99,98%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya dana untuk pendampingan ke tingkat desa				
<i>Outcome</i>	:	Terselenggaranya fasilitasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasayarakatan di desa				

- **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

- a. **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**

- 1. Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

<i>Target</i>	:	Rp 7.000.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 7.000.000				
<i>Prosentase</i>	:	100,00%				
<i>Output</i>	:	Jumlah desa yang didampingi dalam penanganan Covid				
<i>Outcome</i>	:	Terciptanya kondisi yang kondusif di desa dalam upaya				
		pencegahan meluasnya wabah Covid 19				

- **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

- a. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

- 1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

<i>Target</i>	:	Rp 58.800.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 58.800.000				
<i>Prosentase</i>	:	100,00%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya honorarium bagi FORKOPINCAM.				
<i>Outcome</i>	:	Terlaksananya koordinasi untuk menjamin kamtibmas				
		Tingkat Kecamatan.				

- **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- a. **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- 1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

<i>Target</i>	:	Rp 28.566.800				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 28.566.800				
<i>Prosentase</i>	:	100,00%				
<i>Output</i>	:	Tersedianya dana monitoring Pengelolaan Keuangan desa				
<i>Outcome</i>	:	Terwujudnya tertib pengelolaan keuangan oleh desa				

- 2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

<i>Target</i>	:	Rp 24.833.000				
<i>Realisasi</i>	:	Rp 24.833.000				
<i>Prosentase</i>	:	100,00%				
<i>Output</i>	:	Terlaksananya kegiatan MUSRENBANG RKPD Kab. di Kec.				
<i>Outcome</i>	:	Tersedianya dokumen usulan perencanaan pembangunan				
		Tingkat Kecamatan.				

7. Realisasi Pembiayaan

NIHIL

BAB II

**PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH**

(Diisi oleh Tim Penyusun/BKAD)

BAB III

**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH**

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No	OPD Pelaksana	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Keg/Sub Keg	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasi	Tindakan Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kantor Camat Ile Bura	Fungsi Penunjang Prioritas		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten							
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dok	23.777.000	6 dok	23.777.000	-	-	-
				Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah							
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1 tahun	954.959.028	1 tahun	812.658.697	-	-	-
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 orang	24.840.000	4 orang	24.840.000	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 jenis	1.999.392	20 jenis	1.999.392	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54 jenis	11.400.000	54 jenis	11.373.363	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35000 jenis	14.949.600	35000	14.949.600	-	-	-
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	600 porsi	15.000.000	600 porsi	15.000.000	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135 kali	24.670.000	135 kali	24.670.000	-	-	-

No	OPD Pelaksana	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Keg/Sub Keg	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasi	Tindakan juga Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	9.495.000	12 bulan	9.495.000	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 orang	57.500.000	5 orang	56.750.000	-	-	-
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
				Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau Lapangan	3 unit	6.998.245	3 unit	6.998.245	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	20.528.500	1 unit	20.528.500	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11 unit	5.800.000	11 unit	5.800.000	-	-	-
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 paket	58.875.000	1 paket	58.865.000	-	-	-

No	OPD Pelaksana	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Keg	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasi	Tinjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							
				Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	7 desa	7.000.000	7 desa	7.000.000	-	-	-
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	20 kali	58.800.000	20 kali	58.800.000	-	-	-
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21 kali	28.566.800	21	28.566.800	-	-	-

No	OPD Pelaksana	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Keg/Sub Keg	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasi	Tindakan juz Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16 kali	24.833.000	16 kali	24.833.000	-	-	-

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa total target keuangan Kantor Camat Ile Bura pada Tahun Anggaran 2021 untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung adalah Rp. 1.350.711.565,-. Untuk membiayai 5 (lima) Program, 8 (delapan) Kegiatan, 18 (delapan belas) Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten sebesar Rp. 23.777.000 dengan realisasinya sebesar Rp. 23.777.000,- Untuk membiayai 4 (empat) Kegiatan dan 13 (tiga belas) Sub Kegiatan.
2. Target Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 58.875.000 dengan realisasinya sebesar Rp. 58.865.000,- Untuk membiayai 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan.
3. Target Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 7.000.000 dengan realisasinya sebesar Rp. 7.000.000,- Untuk membiayai 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan.
4. Target Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 58.000.000 dengan realisasinya sebesar Rp. 58.800.000,- Untuk membiayai 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan.
5. Target Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 53.399.800 dengan realisasinya sebesar Rp. 58.800.000,- Untuk membiayai 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan.

BAB IV

TUGAS UMUM PEMERINTAH

4.1. Forum Koordinasi

Koordinasi yang dilakukan bersifat langsung dan terarah kepada Badan/Kantor/Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam kaitan dengan penyebaran program/kegiatan yang ada di wilayah Kecamatan Ile Bura. Di Kecamatan dikenal dengan Forum Koordinasi Musyawarah Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM), yang mana secara teknis dilakukan oleh Camat, Kapospol dan Babinsa Ile Bura serta dibantu oleh Sekretariat FORKOPIMCAM yang anggotanya terdiri dari para Kepala-kepala Seksi dan Kepala UPTD se Kecamatan Ile Bura.

Materi Koordinasi berupa :

- Koordinasi Penerapan Protokol Kesehatan dalam kegiatan pelaksanaan KBM di sekolah-sekolah.
- Monitoring dan Evaluasi hasil monitoring PMT Terfokus Gerobak Cinta untuk menemukan beberapa persoalan atau masalah dan mencari solusi penanganan
- Pelaksanaan penilaian lomba tingkat Kecamatan Ile Bura
- Monitoring dan koordinasi pelaksanaan isolasi mandiri terhadap pasien dengan dugaan Covid 19.
- Koordinasi persiapan pelaksanaan PPKM Berskala Mikro dengan mengaktifkan kembali Satgas Tingkat Kecamatan dan pelaksanaan PPKM Berskala Mikro mulai dari tingkat RT.
- Koordinasi persiapan dan pemantauan pelaksanaan Vaksin Masal di wilayah kecamatan.
- Koordinasi pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Desa Lewoawang.
- Lokakarya dan pengesahan program penyuluhan pertanian
- Dialog Forum Komunikasi Umat Beragama tingkat Kecamatan Ile Bura

4.2. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2022

Untuk menghasilkan sebuah perencanaan yang benar-benar optimal baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, maka pendampingan pra pelaksanaan MUSRENBANGDES dilakukan sebanyak 3 (*tiga*) kali, selama Bulan Agustus sampai dengan Bulan Oktober 2021. Dalam kaitan pendampingan Pelaksanaan MUSRENBANGDES penyusunan RKPDesa Tahun 2022 mulai dilakukan oleh Tim

Kecamatan pada Minggu ke-III Bulan Juli 2021 s/d Minggu ke-IV Bulan Oktober 2021.

Adapun hasil dari pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan (*Tim Kecamatan*) :

- ☞ Keterlibatan masyarakat melalui kelembagaan yang ada sangat antusias dan terimplementasi dalam perencanaan yang diusulkan melalui kegiatan-kegiatan pada masing-masing komponen/kelembagaan yang ada di desa.
- ☞ Masyarakat sudah memahami alur perencanaan; berdasarkan hasil kajian masalah-tindakan masalah-dan rumusan kegiatan melalui program/bidang kegiatan yang ada di desa.
- ☞ Adanya titik simpul antara perencanaan masing-masing komponen yang bermuara pada satu usulan kegiatan yang saling berkaitan (*lintas bidang*)
- ☞ Masyarakat sebagai pengawas pembangunan sudah semakin kritis dalam mengevaluasi kegiatan pembangunan di desa dan evaluasi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa yang termuat dalam APBDesa .

4.3. Fasilitasi Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

- ☞ Untuk kegiatan Fasilitasi Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sudah dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- ☞ Evaluasi APBDes untuk desa-desa se Kecamatan Ile Bura dilakukan sesuai jadwal dan tahapannya.
- ☞ Kondisi Pandemi Covid-19 sangat berakibat buruk terhadap pengelolaan APBDes di desa, yang mengakibatkan sebagian anggaran dana desa diprioritaskan untuk pembayaran Bantuan Langsung Tunai selama 12 bulan bagi Keluarga Penerima Manfaat sesuai kesepakatan dalam Musyawarah Penetapan Penerima BLT-Dana Desa dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa Tentang Penerima BLT-dana Desa Tahun 2021.
- ☞ Kondisi ini mengakibatkan sejumlah kegiatan APBDes dialihkan utmuk kegiatan BLT-Dana Desa (*Refocusing*) dan tentu saja pengelolaan keuangan desa mengalami perubahan pada Bulan Oktober 2021.

4.4. Fasilitasi Percepatan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021

- ☞ Penggunaan Dana Desa untuk 7 desa se-Kecamatan Ile Bura meliputi **Bidang Pelaksanaan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan lintas bidang (Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan)** sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- ☞ Untuk kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020 untuk 7 desa se-Kecamatan Ile Bura pengelolaan dana Alokasi Dana Desa sudah selesai dan masih menyisahkan beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan dan akan dilanjutkan sampai dengan Minggu ke-IV Bulan Januari 2022. Kegiatan ini adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2021 dan akan dianggarkan dalam APBDes 2022.
- ☞ Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak untuk 7 desa se-Kecamatan Ile Bura semuanya sudah direalisasi dan diperuntukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- ☞ Untuk progres penyerapan kegiatan pembangunan fisik sarana prasarana sudah dilaporkan progres penyerapan keuangan dan beberapa kegiatan melalui penerapan Padat Karya Tunai.

Tabel
Pagu Dana Desa Tahun 2021

NO	NAMA DESA	PAGU DANA DESA 100%	PENCAIRAN		
			TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)
1	2	3	4	5	6
1	LEWOTOBI	784.569.000	313.827.600	313.827.600	156.913.800
2	RIANGRITA	663.206.000	265.282.400	265.282.400	132.641.200
3	RIANGBARING	671.986.000	268.794.400	268.794.400	134.397.200
4	DULIPALI	688.027.000	275.210.800	275.210.800	137.605.400
5	LEWOAWANG	796.717.000	318.686.800	318.686.800	159.343.400
6	NOBO	807.173.000	322.869.200	322.869.200	161.434.600
7	NURABELEN	653.039.000	261.215.600	261.215.600	130.607.800
	JUMLAH	5.064.717.000	2.025.886.800	2.025.886.800	1.012.943.400

Tabel
Penyerapan Dana Desa Tahun 2021

DESA	SILPA 2020	PAGU DD 2021	CAIR DI RKD	PENGUNAAN DANA DESA 2021				SILPA DD 2021
				DESA AMAN COVID 19	BLT DD	PKTD	KEGIATAN LAIN	
3	4	5	6	7	8	9	10	11
LEWOTOBI	31.811.867	784.569.000	741.973.094	35.770.760	75.600.000	0	0	98.750.275
RIANGRITA	10.939.000	663.206.000	636.665.863	42.856.480	108.000.000	106.120.000	379.689.383	26.540.137
RIANGBARING	30.630.701	671.986.000	618.294.006	13.409.993	259.200.000	0	345.684.013	53.691.994
DULIPALI	4.550.000	688.027.000	656.895.000	36.733.000	136.800.000	78.620.000	0	31.132.000
LEWOAWANG	466.631	796.717.000	758.018.332	35.569.000	72.900.000	22.865.340	626.683	38.698.668
NOBO	12.851.515	807.173.000	755.449.000	22.739.228	97.200.000	52.200.000	437.035.580	146.274.192
NURABELEN	48.160	653.039.000	648.393.000	10.000.000	144.000	114.975.000	384.064.000	4.100.000
Jumlah	91.297.874	5.064.717.000	4.815.688.295	197.078.461	749.844.000	374.780.340	1.547.099.659	399.187.266

Tabel
Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2021

NO	NAMA DESA	PAGU ANGGARAN ADD	URAIAN				BELUM DI REALISASI
			SILTAP KADES DAN PERANGKAT DESA	TUNJ.BPD	OPRS. PERKANTORAN DLL	JMLH. REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LEWOTOBI	356.994.124	275.090.640	51.600.000	30.303.484	351.403.588	5.590.536
2	RIANGRITA	303.927.724	250.824.240	31.800.000	21.303.484	301.527.724	2.400.000
3	RIANGBARING	328.194.124	275.090.640	31.800.000	21.303.484	314.091.524	14.102.600
4	DULIPALI	303.927.724	250.824.240	31.800.000	21.303.484	303.900.000	27.724
5	LEWOAWANG	337.794.124	275.090.640	45.400.000	17.303.484	329.704.840	8.089.284
6	NOBO	347.394.124	275.090.640	51.000.000	21.303.484	343.940.600	3.453.524
7	NURABELEN	303.927.724	250.824.240	41.400.000	11.703.484	300.327.724	3.600.000
	JUMLAH	2.282.159.668	1.852.835.280	284.800.000	144.524.388	2.244.896.000	37.263.668

BAB V

PENUTUP

Akhir kata semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kantor Camat Ile Bura ini dapat membantu pemerintah kabupaten nantinya dalam penyusunan laporan kepada Gubernur sesuai amanat Undang-Undang.

Sekian dan terima kasih.

Lewotobi, Januari 2022.

✓CAMAT ILE BURA,

